

**KEBIJAKAN BASUKI TJAHAJA PURNAMA TENTANG REKLAMASI  
TELUK JAKARTA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MUH RIFQI IQSOBAYADINUR**  
NIM. 12370053

**PEMBIMBING :**

**Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si.**  
NIP. 19630131 199203 1 004

**SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Kebijakan reklamasi yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama merupakan salah satu upaya untuk mengatasi persoalan di DKI Jakarta yang secara umum memiliki permasalahan keterbatasan lahan untuk memenuhi kebutuhan tata ruang perkotaan. Namun, reklamasi dapat menyebabkan dampak buruk yang berpengaruh bagi keberlangsungan hidup bagi masyarakat nelayan yang menempati kawasan sekitar reklamasi.

Penelitian ini yang berjudul “Kebijakan Basuki Tjahaja Purnama Tentang Reklamasi Teluk Jakarta Dalam Perspektif Siyasa” bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dampak kebijakan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta tentang reklamasi teluk Jakarta dalam pandangan teori hak dan kewajiban khalifah menurut Al-Mawardi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) di RW 01 Kampung Pemukiman Nelayan Muara Angke Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara dengan menggunakan pendekatan sosiologis-politik. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian dengan menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat kampung Muara Angke dengan melalui teknik wawancara sebagai data primer kemudian dianalisis dengan mendeskripsikan fenomena tersebut.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan, yaitu: *Pertama*, bahwa kebijakan Basuki Tjahaja Purnama tentang reklamasi teluk Jakarta memberikan dampak politik, ekonomi dan lingkungan terhadap masyarakat nelayan kampung Muara Angke. *Kedua*, kebijakan reklamasi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hak dan kewajiban khalifah menurut Imam al-Mawardi yakni dari segi hak bagi seorang pemimpin belum dapat terpenuhi dan kewajiban bagi seorang pemimpin melalui kebijakan reklamasi ini tidak mencerminkan sikap adil terhadap masyarakat nelayan dan tidak melalui musyawarah secara mufakat, sehingga mengakibatkan masyarakat nelayan tidak menaati perintah pemimpinnya. Justru yang terjadi masyarakat nelayan menyatakan menolak terhadap kebijakan reklamasi tersebut yang berdampak langsung kepada mata pencaharian nelayan dan berdampak terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Selanjutnya proyek reklamasi terdapat masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yaitu terjadi kasus penyuapan terhadap anggota DPRD DKI Jakarta oleh pihak pengembang untuk memuluskan pengesahan Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang menyatakan keberatan atas kontribusi sebanyak 15 persen yang diwajibkan kepada pengembang.

**Kata Kunci: Kebijakan, Reklamasi Teluk Jakarta, Siyasa.**



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh Rifqi Iqsobayadinur  
NIM : 12370053  
Jurusan : Siyasah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Kebijakan Basuki Tjahaja Purnama Tentang Reklamasi Teluk Jakarta Dalam Perspektif Siyasah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 September 2016

Yang menyatakan,



Muh Rifqi Iqsobayadinur  
NIM. 12370053



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh Rifqi Iqsobayadinur  
NIM : 12370053  
Judul Skripsi : Kebijakan Basuki Tjahaja Purnama Tentang Reklamasi  
Teluk Jakarta Dalam Perspektif Siyasah

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 19 September 2016

Pembimbing,

**Drs. Rizal Oosim, M.Si**  
**NIP. 19630131 199203 1 004**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-502/Un.02/DS/PP.00.9/10/2016

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN BASUKI TJAJAJA PURNAMA TENTANG REKLAMASI TELUK JAKARTA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

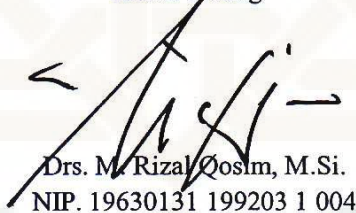
yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MUH RIFQI IQSOBAYADINUR  
Nomor Induk Mahasiswa : 12370053  
Telah diujikan pada : Jumat, 23 September 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

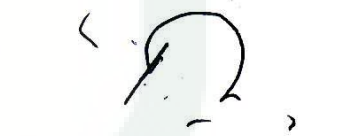
Ketua Sidang

  
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji 1

  
Dr. H. M. Nur, M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji 2

  
Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.  
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 23 September 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



  
Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	-'	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةَ ditulis Ahmadiyyah

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

jam 'ah

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis kar matul-auly '

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

### E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya.

### F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis Bainakum

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلًا ditulis Qaul

### G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis A'antum

أُمَّنَا ditulis Mu'anna

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis Al-Qur' n

الْقِيَّاسُ ditulis Al-Qiy s

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

السَّامَاءُ ditulis As-sama'

السَّيَّمُ ditulis Asy-syams

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

## J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ditulis awial-fur d

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ

ditulis ahlas-Sunnah

شَيْخُ الْإِسْلَامِ

ditulis Syaikhul-Islam

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Alquran, hadis, mazhab, syariat.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

**MOTTO**

***“Manusia tak akan bisa memperbaiki  
kekacauan tanpa ada pemimpin bagi mereka”***

*- Al-Afwah Al-Audi*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Setelah melalui proses yang cukup panjang, sehingga penyusunan skripsi ini telah selesai dengan dukungan semua pihak yang ikut serta membantu dan memberikan dukungan, penyusun hanya dapat mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada;

Kedua Orang tua saya, Ayah Moh Sobir dan Ibunda Roziqoh,

Adik kandungku, Siti Iqsobayani Putri Yuliani

Bapak – Ibu Dosen Prodi Siyasah UIN Sunan Kalijaga

Rekan-rekan Takmir & Sahabat Masjid Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga

Alamamater & Kawan-kawan Prodi Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Masyarakat kampung nelayan Muara Angke Jakarta Utara

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Bapak Rizka Okie Wibowo, Bapak Feirully Irzal dan

segenap jajarannya

Rekan-rekan PAKSI yang telah membantu dalam mengarahkan penyusun di lokasi

penelitian.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده  
ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah menuntun umat manusia dari masa kebodohan dan keterbelakangan menuju masa yang terang-benderang dan penuh pencerahan.

Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **KEBIJAKAN BASUKI TJAHAJA PURNAMA TENTANG REKLAMASI TELUK JAKARTA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH** secara lancar. Jalannya penelitian dan penyusunan skripsi ini, tentunya telah melibatkan kerjasama dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Teriring doa dan ucapan syukur, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. M. Nur., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta menyempurnakan skripsi ini di sela-sela kesibukannya. Semoga kebaikan dan keikhlasan bapak diberikan balasan oleh Allah SWT.
5. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Sekjur Siyasah.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluargaku tercinta Ayahanda Moh.Sobir, Ibunda Roziqoh, atas do'a dan nasehatnya, serta adik kandungku Siti Iqsobayani Putri Yuliani, yang saya sayangi.
8. Sahabat-sahabatku satu angkatan Prodi Siyasah serta kakak, adik kelasku yang selalu memotivasi dan memberikan informasi mengenai perkuliahan.
9. Terima kasih kepada seluruh staf Pemrov DKI Jakarta, terutama kepada Bapak Rizka Okie Wibowo dan Bapak Feirully Irzal, serta kepada dosen dan akademisi UI dan UNJ, selanjutnya terima kasih kepada masyarakat nelayan Muara Angke yang telah memberikan informasi terkait dengan penelitian ini kepada penyusun.

10. Terima kasih yang sangat banyak kepada teman-teman paguyuban anak Karang Asem dan Sidodadi (PAKSI) yang telah banyak membantu dalam mengarahkan penyusunan di lapangan.

11. Kepada semua pihak yang ikut andil dalam kelancaran penyusunan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka dengan senang hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi pencapaian hasil yang sempurna. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi banyak orang.

Yogyakarta, 20 Juli 2016



**Muh Rifqi Iqobayadinur**  
**NIM. 12370053**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II KONSEP DASAR KEBIJAKAN DAN KONSEP PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG IMAMAH (KEPEMIMPINAN).....</b>	<b>25</b>
A. Konsep Dasar Kebijakan.....	25
B. Konsep Pemikiran Imam al-Mawardi Tentang Imamah (Kepemimpinan) .....	30

<b>BAB III GAMBARAN UMUM REKLAMASI.....</b>	<b>40</b>
A. Keadaan Umum Daerah .....	40
B. Sejarah dan Makna Reklamasi .....	43
C. Dampak Kebijakan Reklamasi .....	50
D. Kebijakan Reklamasi Basuki Tjahaja Purnama “Ahok” .....	55
E. Legalitas Reklamasi Dalam Kebijakan Ahok.....	58
F. Kepentingan Reklamasi Bagi Masyarakat Muara Angke .....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Dampak Kebijakan Ahok Tentang Reklamasi.....	65
B. Analisis Siyasah Terhadap Kebijakan Ahok Tentang Reklamasi .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Daftar Terjemahan Teks Arab.....	I
2. Pedoman Wawancara .....	III
3. Biografi Imam Al-Mawardi.....	VI
4. Surat Izin Penelitian .....	VII
5. Lembar Bukti Wawancara .....	VIII
6. Dokumentasi.....	IX
7. Curriculum Vitae .....	XIV

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Komposisi Penduduk Menurut Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin di Kelurahan Pluit dalam Laporan Tahun 2015.....	41
Tabel 3.2	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Mata Pencarian di Kelurahan Pluit dalam Laporan Tahun 2015.....	42
Tabel 3.3	Regulasi Tentang Reklamasi Teluk Jakarta .....	60
Tabel 4.1	Persentase Pandangan Responden Terhadap Reklamasi.....	66
Tabel 4.2	Persentase Keuntungan yang Dirasakan Responden Terhadap Reklamasi.....	70
Tabel 4.3	Persentase Kerugian yang Dirasakan Responden Terhadap Reklamasi.....	71

## DAFTAR ISTILAH

Biota	: Keseluruhan flora dan fauna yang terdapat dalam suatu daerah.
<i>Coastal and engineering</i>	: Rekayasa daerah pantai
Degradasi	: Penurunan kualitas atau mutu
Diskresi	: Kebebasan mengambil keputusan sendiri di setiap situasi yang dihadapi
Drainase	: Pembuangan air permukaan suatu daerah secara alamiah
Ekosistem	: Kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas
Ekologi	: Ilmu tentang lingkungan
<i>Environmental services</i>	: Jasa-jasa lingkungan, seperti pariwisata dan olahraga
Erosi	: Pengikisan/penipisan permukaan bumi oleh air mengalir, gelombang ombak atau arus
Habitat	: Tempat makhluk hidup
<i>Imamah</i>	: Kepemimpinan
Konservasi	: Perlindungan atas sesuatu dengan pemeliharaan
Konsesi	: Pemberian hak, izin atau tanah oleh pemerintah, perusahaan atau individu
Mangrove	: Tanaman bakau
Reklamasi	: Pekerjaan untuk mendapatkan bidang lahan di atas perairan dengan luasan tertentu
Revitalisasi	: Suatu proses untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya.
Sedimentasi	: Pengendapan
<i>Siyasāh</i>	: Politik Islam
Subsistem	: Memenuhi kehidupan jangka pendek
<i>Stakeholder</i>	: Pengampu kebijakan
<i>Water Front City</i>	: Kota tepi pantai

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Peta Rencana Reklamasi Teluk Jakarta .....	48
--	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Teluk Jakarta yang terletak di sebelah utara kota Jakarta, pada umumnya merupakan perairan dangkal yang memiliki kedalaman rata-rata 15 meter dengan luas sekitar 514 km<sup>2</sup>. Teluk tersebut merupakan muara 13 sungai yang melintasi kawasan metropolitan Jakarta. Kawasan tersebut dijadikan tempat untuk dilakukan reklamasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai daerah kawasan aktifitas bisnis dan pusat perekonomian maupun pemukiman elit. Sehingga Pemprov DKI Jakarta dan beberapa perusahaan mitra kerjanya dengan tujuan ingin mengubah predikat Jakarta dengan julukan *Water Front City*.<sup>1</sup>

Namun, di DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia telah dipadati oleh penduduknya dengan jumlah sekitar 10.187.595 jiwa. Sedangkan wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) ditempati sekitar 28 juta jiwa dan termasuk metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia. Hal tersebut ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk di setiap tahunnya, karena Jakarta dikenal oleh masyarakat luas sebagai kota

---

<sup>1</sup> Ruchyat Deni Djakapermana, *Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan*, (Jakarta: Kementerian PU, 2015). hlm 1.

yang memiliki potensi perekonomian cukup tinggi sehingga menjadi pilihan utama bagi sebagian rakyat Indonesia untuk mengadu nasib.<sup>2</sup>

Dengan melihat persoalan yang terjadi di wilayah Jakarta, di mana setiap tahunnya mengalami laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, maka luas daratan Ibu kota Jakarta dipandang sudah tidak mencukupi lagi sebagai tempat penyediaan ruang bagi kawasan pemukiman elit, tempat wisata, kawasan bisnis, perdagangan, pelabuhan dan perdagangan jasa komersial. Melihat keterbatasan lahan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang tidak proporsional, maka solusi alternatif pemerintah DKI Jakarta adalah melalui reklamasi di sepanjang utara kota Jakarta. Lain halnya pada wilayah bagian selatan kota Jakarta yang sudah dijadikan sebagai wilayah konservasi, pada bagian barat dan timur juga sudah dipadati dengan pemukiman dan industri. Jadi, hanya pada bagian utara kota Jakarta saja yang memungkinkan untuk dilakukan perluasan daratan melalui reklamasi sekaligus dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan sekitar teluk Jakarta yang dipandang sudah terdegradasi.

Begitu jumlah penduduk semakin bertambah dengan cepat kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan penduduk makin berkurang. Bahkan aktivitas penduduk di beberapa belahan dunia telah melampaui kemampuan

---

<sup>2</sup> “Daerah Khusus Ibukota Jakarta,” <https://id.wikipedia.org>, di akses pada 27 April 2016.

lingkungan untuk memperbaiki diri, yang terjadi akhirnya adalah degradasi lingkungan yang berdampak buruk bagi manusia. Upaya penduduk untuk meningkatkan taraf hidup dilakukan antara lain melalui pembangunan yang bertujuan untuk memproduksi kebutuhan manusia secara massal. Pada persoalan tata ruang perkotaan dapat melalui proses pembangunan perkotaan untuk memenuhi kebutuhan. Akan tetapi di sisi lain, proses pembangunan ternyata membawa dampak pada memburuknya lingkungan. Masalah lingkungan bukan hanya persoalan limbah dan polusi yang menghantui kota-kota besar, tetapi juga mengancam ekosistem lingkungan di sekitarnya.<sup>3</sup>

Reklamasi bukan merupakan hal baru bagi Jakarta, sebab kegiatan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan dengan cara pengurukan dan pengeringan lahan atau drainase tersebut merupakan amanat dari Kepres No 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta. Reklamasi dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan sebagai alternatif kebutuhan pengembangan perkotaan dan sinkronisasi dengan rencana penataan ruang. Tetapi dalam pelaksanaannya, proyek reklamasi selalu melibatkan mitra kerja dengan perusahaan-perusahaan besar atau pihak swasta yang memiliki modal besar untuk melakukan reklamasi dengan melalui perizinan yang diberikan oleh pemerintah setempat. Hal tersebut mengingat kegiatan reklamasi diperlukan biaya yang cukup besar, sehingga pemerintah memberikan izin kepada pihak

---

<sup>3</sup> Eva Banowati, *Geografi Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm 50.

pengembang untuk melakukan reklamasi dengan kontrak hak guna bangun sesuai kesepakatan antara pemerintah dengan pihak pengembang dalam jangka waktu tertentu.

Dengan menyediakan lahan baru pada wilayah pesisir tersebut, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan lahan atau habitat yang sudah ada dan dinyatakan telah siap untuk dilakukan reklamasi. Hal ini akan secara menyeluruh mengubah daerah tersebut dari kawasan kumuh yang ditempati oleh masyarakat menengah ke bawah menjadi kawasan elit yang menurut Pemprov DKI Jakarta sebagai solusi untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk sekitar 2,7% per tahun dan untuk mengatasi kesulitan penyediaan ruang tersebut.<sup>4</sup>

Kegiatan reklamasi di Indonesia harus mengacu pada aturan maupun pedoman Undang-Undang yang mengatur tentang reklamasi pantai yaitu terdapat pada Peraturan Menteri PU No. 40/PRT/M/2007 mengenai Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara yang merupakan turunan dari Keputusan Presiden pada tahun yang sama mengenai Reklamasi Teluk Jakarta, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Keputusan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 2.

Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang. Kemudian Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur tentang perlindungan terhadap aset baik berupa jiwa, raga, harta, sehingga ancaman bencana yang ada di wilayah pesisir dapat di minimalisir.<sup>5</sup>

Upaya Pemprov DKI Jakarta melalui reklamasi tersebut salah satunya bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan, di mana kawasan yang dilakukan reklamasi akan dibangun sebanyak 17 pulau, mulai dari pulau A hingga Q. Tiga kawasan akan membagi pulau ini seperti kawasan barat untuk pemukiman dan wisata, kawasan tengah untuk perdagangan jasa dan komersial sedangkan kawasan timur untuk distribusi barang, pelabuhan dan pergudangan. Tetapi permasalahan yang timbul kemudian adalah kondisi topografi yang dilandai dari muara ke teluk Jakarta dan panjangnya aliran sungai akan menjadikan aliran lambat sehingga mudah terjadi banjir atau abrasi. Sehingga kebijakan Pemprov DKI mengenai proyek reklamasi itu telah diprotes oleh masyarakat nelayan di sekitar wilayah reklamasi bahwa mereka memprotes kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak melakukan reklamasi di wilayah tersebut dengan alasan akan mengkhawatirkan kelestarian lingkungan dan berdampak luas terhadap ancaman ekosistem kelautan di sekitarnya sehingga menyulitkan masyarakat nelayan dalam mencari hasil laut untuk memenuhi kehidupannya.

---

<sup>5</sup> Olivianty Rellua, *Proses Perizinan dan Dampak Lingkungan Terhadap Reklamasi Pantai*, (Surabaya: Mitra Press, 2013) hlm 158.

Oleh karena itu, reklamasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta lebih berorientasi kepada persoalan bisnis di antara pihak investor dan perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan kegiatan perekonomian sebagaimana dalam teori properti mengatakan bahwa harga tanah dapat melonjak naik dua hingga tiga kali lipat terjadi karena lokasi yang strategis dan memiliki daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki oleh kawasan lain.<sup>6</sup> Sehingga reklamasi dalam hal ini akan menguntungkan kepada suatu korporasi tertentu atau dapat dinikmati oleh sebagian kalangan saja, sedangkan yang terjadi nasib masyarakat nelayan di sekitarnya terabaikan mengingat dampak yang terjadi daripada reklamasi. Ini berarti kegiatan reklamasi telah mengabaikan aspek ekologi, sosial dan ekonomi. Padahal kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin setidaknya harus mempertimbangkan aspek keadilan terhadap rakyatnya, sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak menimbulkan kerugian di lain pihak dan tidak memberikan keuntungan yang diperoleh segelintir kelompok.

Islam memandang bahwa danau, kawasan pesisir dan laut merupakan harta milik umum seluruh rakyat. Harta milik umum dalam syari'ah tidak boleh dikuasai atau dikuasakan kepada individu maupun korporasi tertentu. Menurut syari'ah, negara mengeluarkan peraturan tertentu untuk dapat memberikan maslahat kepada seluruh rakyat untuk dapat memanfaatkan atau mendapatkan

---

<sup>6</sup> Soekardjo, Hardjosoewirjo, *Menuju Jakarta 2020*, (Jakarta: RMBOOKS, 2008), hlm 62.

manfaat dari harta milik umum. Negara juga sebaliknya harus dapat mengelola secara langsung harta milik bersama dan hasil pengelolaan itu seluruhnya dikembalikan kepada rakyat baik secara langsung maupun dalam bentuk berbagai pelayanan.<sup>7</sup>

Sejatinya, seorang pemimpin dalam Islam sering dikenal dengan *imamah* (kepemimpinan) yang bertugas melindungi rakyat dan mengatur kemaslahatan hidup. Hal ini berdasarkan *ijma'* ulama bahwa mengangkat atau menentukan seseorang pemimpin hendaknya memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas *imamah*. Begitu pula rakyat diwajibkan untuk menaati *ulil amri*, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 59 :

<sup>8</sup>... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأ

Dalam kajian politik Islam (*siyas h*) telah mengajarkan prinsip keadilan bagi seorang pemimpin terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemimpin dan bersifat mengikat bagi umatnya, oleh sebab itu menurut Imam al-Mawardi negara hendaknya memiliki syarat-syarat pemimpin, salah satunya memiliki sifat adil secara menyeluruh. Terwujudnya keadilan akan

---

<sup>7</sup> "Harta Kepemilikan Umum", <https://hizbut-tahrir.or.id>, di akses pada 28 Juli 2016.

<sup>8</sup> An-Nisa' (4): 59.

menciptakan persatuan, membangkitkan kesetiaan rakyat, memakmurkan negeri, yang akhirnya mengamankan kedudukan penguasa.<sup>9</sup>

Seorang pemimpin yang memiliki kewenangan hendaknya mengeluarkan kebijakan yang dibuat untuk menanggapi suatu masalah. Dalam mengeluarkan kebijakan, pemimpin setidaknya tetap berdasarkan kaidah-kaidah dan pedoman-pedoman yang terdapat dalam Nash. Seperti dilakukannya musyawarah (*As-Syuro'*) yakni bahwa dalam mengeluarkan suatu kebijakan, pemimpin tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Ia harus mempertimbangkan pendapat dari para ahli atau pakar dalam masalah yang bersangkutan. Selain itu, Imam al-Mawardi menegaskan bahwa tugas dan kewajiban seorang khalifah/imam/pemimpin ialah melindungi dan menjaga rakyatnya agar terhindar dari gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.<sup>10</sup>

Persoalan di atas yang ditimbulkan dari adanya reklamasi ini menimbulkan dampak sosial terhadap masyarakat sehingga mempengaruhi beberapa aspek-aspek sosial seperti aspek ekonomi, agama, budaya bahkan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Akan tetapi, fokus penelitian ini mengenai dampak politik, dampak ekonomi dan dampak lingkungan terhadap masyarakat nelayan di sekitar wilayah tersebut tentang reklamasi. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, menarik bagi peneliti

---

<sup>9</sup> Al-Mawardi, *Adab la-Duny Kwa la-D n, op.cit.*, hlm 122.

<sup>10</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam/Imam al-Mawardi*, (Jakarta : Qisthi Press, 2014) hlm 33.

untuk melakukan penelitian terkait kebijakan Basuki Tjahaja Purnama tentang reklamasi teluk Jakarta dalam perspektif siyasah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak kebijakan Basuki Tjahaja Purnama tentang reklamasi teluk Jakarta?
2. Bagaimana siyasah memandang kebijakan Basuki Tjahaja Purnama tentang reklamasi teluk Jakarta?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana kebijakan Basuki Tjahaja Purnama tentang reklamasi teluk Jakarta di bahas dalam perspektif siyasah.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam khasanah keilmuan terutama dalam kajian politik lingkungan dan siyasah (politik Islam).
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan

permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai bahan acuan atau pembanding bagi mereka yang melakukan penelitian mengenai kebijakan pemerintah dalam melaksanakan proses reklamasi pantai.

4. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah setempat dalam melaksanakan tugas pengawasan guna memecahkan persoalan yang dihadapi agar tugas-tugas pokok dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka digunakan untuk menentukan posisi penyusun dalam sebuah penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Berkaitan dengan penelitian yang peneliti susun terdapat beberapa literatur maupun karya tulis, baik berupa buku, skripsi dan jurnal. Untuk mendukung penelitian ini digunakan beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai telaah pustaka :

Pertama, buku karya Arif Satria dengan judul “*Politik Kelautan dan Perikanan*”, buku tersebut berusaha menganalisis kebijakan mengenai kelautan dan perikanan, buku tersebut menyajikan informasi bagaimana membangun kelautan berbasis ekonomi kelautan biru untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memperhatikan keramahan lingkungan dan berkelanjutan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah pesisir (nelayan). Sehingga buku tersebut membantu penyusun dalam

menganalisis permasalahan yang ada di antara pihak pemerintah dengan pihak nelayan sebagaimana menjadi obyek penelitian.

Kedua, buku karya dari Prof. DR. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Dengan judul “*Hukum Lingkungan Di Indonesia*”, buku tersebut membahas tentang hukum lingkungan di Indonesia yang memaparkan tentang pengertian dan pembedaan hukum lingkungan, posisi hukum lingkungan dalam konteks ilmu hukum, pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengaturan pemanfaatan sumber daya alam hingga penyelesaian sengketa lingkungan. Sehingga membantu penulis dalam memahami persoalan lingkungan dan juga bagaimana penanganannya dilihat dari perspektif hukum atau yuridis.

Ketiga, buku karya Imam al-Mawardi dengan judul “*Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam / Imam al-Mawardi*”, buku tersebut merupakan buku hasil terjemahan dari Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Buku tersebut memuat teori-teori politik Islam (*siy sah*) yang memuat hukum-hukum yang sangat dibutuhkan oleh penguasa, khususnya khalifah dan jajarannya. Selain itu memuat tentang hak dan kewajiban seorang penguasa. Buku ini penulis jadikan sebagai paparan yang akan menjawab permasalahan di atas. Selain dengan buku-buku di atas, terdapat buku yang berjudul *Fiqh Politik Islam*, karangan Farid Abdul Khaliq berisi mengungkap hak-hak rakyat yang ada di pundak pemerintah dan menjelaskan kewajiban-

kewajiban rakyat terhadap pemerintah begitu pula membahas syarat yang harus ada dalam seorang pemimpin.

Keempat, skripsi dari Abdul Muiz mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Jurusan Ilmu Komunikasi yang berjudul “Twitter Sebagai Media Propaganda (Analisis Wacana pada Tweet Akun @ForBali13 sebagai Media Propaganda Tolak Reklamasi Tanjung Bena Periode 1 Desember 2014-31 Januari 2015)”. Skripsi tersebut membahas tentang propaganda yang coba disampaikan oleh akun Twitter @ForBali13 tentang bahaya dan dampak negatif dari reklamasi Tanjung Bena. Isi konten tweet yang disampaikan merupakan bentuk kegelisahan nyata dari masyarakat Bali akan kekhawatiran dari dampak negatif reklamasi Teluk Bena.<sup>11</sup>

Kelima, skripsi dari Audy Rahmat mahasiswa Universitas Hasanudin Makassar Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum yang berjudul “Pengesahan Pelaksanaan Perizinan Reklamasi Pantai di Kota Makassar”. Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan kewenangan perizinan reklamasi pantai di kota Makassar. Penemuan penelitian tersebut ialah bahwa segala bentuk perizinan

---

<sup>11</sup> Abdul Muiz, “Twitter Sebagai Media Propaganda (Analisis Wacana pada Tweet Akun @ForBali13 sebagai Media Propaganda Tolak Reklamasi Tanjung Bena Periode 1 Desember 2014-31 Januari 2015),” *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

reklamasi pantai belum bisa dilakukan sebab belum ada peraturan walikota yang dimiliki terkait pelaksanaan izin reklamasi sebagai landasan hukum.<sup>12</sup>

Keenam, skripsi dari Eka Christiningsih Tanlain mahasiswa Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang berjudul “Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas Maritim Indonesia – Singapura”. Skripsi tersebut membahas mengenai proses reklamasi yang dilakukan oleh Singapura tersebut berdampak pada penentuan batas maritim Indonesia - Singapura bergeser ke arah selatan sehingga membawa keuntungan bagi Singapura karena luas wilayah teritorialnya bertambah luas, kemudian sebaliknya reklamasi pantai Singapura membawa kerugian bagi Indonesia karena wilayah perairan dan kedaulatan teritorialnya berkurang.<sup>13</sup>

Ketujuh, Jurnal yang cukup menarik bagi penyusun dalam melakukan kajian tepatnya mengenai “*Dampak Reklamasi Teluk Jakarta Pada Ekosistem Mangrove*”, Jurnal tersebut merupakan karya dari mahasiswa Institut Pertanian Bogor yakni karangan Hadi S. Alikodra yang berisi tentang bahaya dari reklamasi yang dapat mengancam ekosistem hutan mangrove yang berada di Teluk Jakarta, sehingga pelestarian dan perlindungan terhadap ekosistem hutan

---

<sup>12</sup> Audy Rahmat, “Pengesahan Pelaksanaan Perizinan Reklamasi Pantai di Kota Makassar,” *skripsi* Universitas Hasanudin Makasar (2014).

<sup>13</sup> Eka Christiningsih Tanlain, “Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas Maritim Indonesia – Singapura,” *skripsi* Universitas Jember (2014).

mangrove di sekitar wilayah reklamasi harus tetap dijaga, jika tidak maka dapat menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas ikan, udang, kepiting, kerang di Teluk Jakarta dan hilangnya fungsi lindung bagi perembesan air laut ke daratan, penahanan potensi air tanah dan hilangnya fungsi penahanan angin dan gelombang laut serta habitat bagi berbagai jenis satwa. Sehingga sangat membantu penulis.<sup>14</sup>

Berbeda dengan peneliti yang pernah ada sebelumnya, bahwa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang persoalan media sosial yang memberitakan reklamasi dan proses pelaksanaan perizinan hingga dampak lingkungan terhadap reklamasi pada suatu wilayah. Tetapi penyusun akan meneliti lebih dalam tentang dampak kebijakan Basuki Tjahaja Purnama tentang reklamasi teluk Jakarta dibahas menggunakan perspektif siyasah dengan metode penelitian deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan sosiologis-politik. Selanjutnya, karya-karya di atas sangat penting untuk dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini.

#### **E. Kerangka Teori**

Melihat dampak dari permasalahan sosiologi-politik yang diakibatkan oleh kebijakan Basuki Tjahaja Purnama mengenai reklamasi, maka penulis

---

<sup>14</sup> Hadi S. Alikodra, "Dampak Reklamasi Teluk Jakarta Pada Ekosistem Mangrove." *Media Konservasi* Vol. V No. (1), April 1996 : 31-34.

akan menggunakan beberapa teori untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, seperti:

### 1. Teori Kebijakan Publik

Menurut Lasswell (1970) : Kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah (*a projected program of goals values and practices*). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek sosial yang ada dalam masyarakat. Maka secara umum, istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan).<sup>15</sup>

Selanjutnya, menurut Prof. Dr. Andi Agustang, M.Si. Kebijakan seharusnya mempertimbangkan objek sosiologis. Oleh karena itu, pengambilan keputusan atau kebijakan mulai di tingkat masyarakat hingga lembaga pemerintahan di tingkat nasional, hendaknya mempertimbangkan pula pandangan sosiolog yang dapat menganalisis secara tajam dan memberi solusi bagi berbagai persoalan kemasyarakatan, pembangunan dan lingkungan. Tujuannya ialah untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat yang diakibatkan dari adanya kebijakan tersebut. Sedangkan selama ini yang telah terjadi adalah produk suatu kebijakan mulai tingkat

---

<sup>15</sup> Budi Winaryo, *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hlm. 16.

nasional hingga daerah sering kali mengabaikan aspek sosiologis sehingga tidak dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.<sup>16</sup>

Kebijakan seharusnya berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk menyejahterakan masyarakat dan kebijakan tersebut bersifat adil, tidak memihak korporasi tertentu. Bahkan dalam Alquran, Allah memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil dalam segala hal, terutama mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan. Mereka adalah para pemimpin yang berpengaruh terhadap masyarakat seperti pemimpin daerah (gubernur). Terdapat beberapa variasi yang mengungkap keadilan di dalam al-qur'an yakni bahwa dia menjadikan sebagai tingkatan yang terdekat dan yang merupakan dasar segala tindakan baik teori maupun praktek. Dan juga sebagai dasar penegakan pemerintahan yang adil.

## 2. Teori Politik Islam (*siy sah*)

Teori politik Islam (*siy sah*) yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah teori hak dan kewajiban khalifah. Menurut al-Mawardi menyebutkan ada dua hak khalifah/imam, yaitu hak untuk di ta'ati dan hak untuk di bantu, yakni dengan syarat pemimpin tersebut tidak memerintahkan perbuatan maksiat. Namun, jika maksiat itu di perintahkan

---

<sup>16</sup>“Pakar: Jadikan Sosiologi Acuan Kebijakan Publik”, <https://antarasulsel.com>, diakses pada 3 September 2016.

olehnya maka jangan di dengarkan dan tidak perlu ditaati.<sup>17</sup> Hak tersebut datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik, kewajiban imam menurut al-Mawardi secara umum ada sepuluh: (1) memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh ulama salaf, (2) memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan di antara dua pihak yang saling bertikai dengan tujuan agar keadilan dapat ditegakkan secara merata sehingga orang zalim tidak bertindak sewenang-wenang dan orang teraniaya tidak semakin dibuat menderita, (3) melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta, (4) menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah s.w.t tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan, (5) melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikit pun untuk menodai kehormatannya, (6) memerangi orang yang menentang Islam setelah melakukan dakwah dengan baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula menjadi kafir dzimmi, (7) mengambil harta *fai* dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu, (8) menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak

---

<sup>17</sup> Lihat hadis riwayat Muslim No.3423 tentang wajib mentaati pemimpin dalam hal yang bukan maksiat dan haram mematuhi mereka dalam kemaksiatan, Imam Abu Husain, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, t.th.)

menerimanya dari Baitul Mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya, (9) mengangkat orang-orang jujur dan profesional di bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan. Dengan begitu di tangan mereka tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan keuangan dapat terbukukan dengan rapi, (10) melaksanakan tugas-tugas yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.<sup>18</sup>

Namun, dalam penelitian ini penulis hanya mengambil dua teori kewajiban khalifah menurut al-Mawardi, yakni kewajiban pemimpin harus mengedepankan sikap adil terhadap rakyatnya. Adil dalam hal ini, tidak memihak kepentingan golongan tertentu dan tidak menjadikan rakyat bertambah susah, resah, merugikan, bahkan mematikan mata pencaharian rakyat yang disebabkan oleh kebijakan yang dikeluarkan pemimpin tersebut. Dan selanjutnya perintah yang diwajibkan oleh pemimpin terhadap penetapan sebuah kebijakan menurut al-Mawardi bahwa untuk menghentikan permusuhan yang terjadi oleh kedua belah pihak yang saling bertikai maka pemimpin hendaknya dapat mengatasi masalahnya melalui proses musyawarah yang dilakukan oleh pembuat kebijakan kepada masyarakat dengan tujuan untuk membuat keputusan bersama dalam penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Dalam Islam dikenal dengan istilah (*As-Syuro'*) atau musyawarah

---

<sup>18</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam/Imam al-Mawardi*, (Jakarta : Qisthi Press, 2014) hlm 33.

yakni bahwa dalam mengeluarkan suatu kebijakan, seorang pemimpin agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan masyarakatnya.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan mencari data secara langsung di lapangan melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di kampung Pemukiman Nelayan Muara Angke RW 01 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola deskriptif analitis, yaitu dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menggambarkan, menguraikan secara sistematis kemudian menganalisis secara cermat dan komprehensif sehingga memperoleh gambaran dari objek penelitian. Dengan demikian akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan kesimpulan dan menjawab permasalahan penelitian.

---

<sup>19</sup> Muhammad Nur, “Prinsip Universal Agama dan Politik”, *Hand Out Mata Kuliah Agama dan Politik*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-politik, terkait dengan kebijakan mengenai reklamasi yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat kampung Muara Angke terutama yang berprofesi sebagai nelayan. Pendekatan sosiologis digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami tindakan atau interaksi sosial masyarakat. Sosiologi merupakan kajian yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan memahami berbagai fenomena-fenomena yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangatlah penting dalam kejelasan lebih lanjut mengenai penelitian ini karena penelitian ini bersifat deskriptif analitis maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### a. Wawancara (Interview)

Wawancara ditujukan kepada informan dan narasumber yakni kepada nelayan, pemerintah dan akademisi yang lebih mengetahui kondisi lokasi penelitian. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden yaitu kepada masyarakat kampung Muara Angke secara acak sebanyak 15 orang untuk memperoleh informasi terkait dengan dampak kebijakan mengenai reklamasi yang dialami langsung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 orang

yang berbeda sesuai tugas dan bidangnya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengambilan kebijakan tentang reklamasi, selanjutnya kepada akademisi sebanyak 3 orang untuk mendapatkan informasi mengenai reklamasi sesuai bidang keilmuan yang berbeda.

Melalui teknik wawancara bertujuan untuk memperoleh data mengenai kondisi sosial politik masyarakat, latar belakang munculnya reklamasi, pola hubungan sosial masyarakat, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat akibat adanya reklamasi dan sikap masyarakat terhadap reklamasi.

b. Observasi

Dalam penelitian, observasi pada awalnya dilakukan dengan cara mendatangi objek penelitian yang bertempat di kampung Muara Angke dengan cara mengamati terhadap pola perilaku masyarakat sekitar, kondisi lingkungan, kondisi sumber daya manusia, kondisi sosial-ekonomi, Hasil pengamatan observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa kondisi masyarakat di kawasan kampung nelayan Muara Angke tidak jauh berbeda dengan kondisi masyarakat pesisir lainnya di mana kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya seperti perdagangan dan pengolahan hasil laut. Sebagian nelayan yang ada di Muara Angke merupakan pendatang dari luar wilayah DKI Jakarta seperti dari Indramayu, Kalimantan, Sulawesi, Tegal dan sebagainya.

Sebagai tambahan, metode pengumpulan data yang di unduh dari internet/online juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.<sup>20</sup> Teknik pengumpulan data ini melibatkan beberapa buku untuk menguatkan landasan teoritis. Sedangkan cara memperoleh data tersebut dapat diperoleh dari sumber tertulis dalam berupa buku, skripsi, artikel, jurnal, ataupun media cetak. Teknik pengumpulan data di atas digunakan sebagai dasar penunjang dalam penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Dari dokumen maupun data-data yang telah diperoleh di lapangan dengan cara melalui wawancara selanjutnya penulis mengisi bukti wawancara yang berupa data identitas dari setiap responden dan dilakukan pengambilan dokumentasi dalam bentuk foto maupun rekaman audio untuk memudahkan penulis dalam mencatat data-data dari hasil wawancara. Setelah itu, dilakukan pencatatan analisis data dengan menempatkan masing-masing data secara sistematis melalui transkrip wawancara yang sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh masing-masing responden guna melindungi keaslian dan kesan natural dalam penelitian. Karena penelitian ini sifatnya deskriptif analitis, maka peneliti menguraikan secara sistematis data-data yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan penelitian untuk kemudian diklarifikasi dan

---

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007). hlm 121.

di analisis. Data-data yang diperoleh dari lapangan (data primer), literatur buku atau lainnya (data sekunder) dianalisis melalui teknik deduktif - induktif yaitu data-data umum yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini supaya sistematis dan menghasilkan penelitian yang maksimal. Peneliti membagi sistematika pembahasan disusun menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab I memuat pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang berisi tentang hal-hal mendasari penelitian. *Kedua*, rumusan masalah yang merupakan inti dari permasalahan dan ditungkan dalam bentuk pertanyaan. *Ketiga*, tujuan dan manfaat penelitian yang mencakup tujuan bersifat teoritis dan tujuan bersifat praktis yang merupakan target dari penelitian. *Keempat*, tinjauan atau telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. *Kelima*, kerangka teori atau landasan teori yang mencakup kerangka berfikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian berisi tentang teknik yang akan digunakan dalam penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan yang merupakan uraian logis menyangkut

hubungan antara urutan bab pembahasan dengan bab lainnya dan antara sub-bab pembahasan dengan sub-bab lainnya.

Bab II berisi tentang uraian secara ringkas mengenai konsep dasar kebijakan, konsep pemikiran Imam al-Mawardi tentang Imamah (kepemimpinan), pengangkatan Imamah, status wajibnya mengangkat Imamah, kewajiban umat mengetahui sifat-sifat Imam (khalifah) dan tugas-tugas Imam yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk melihat persoalan mengenai kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta terhadap reklamasi teluk Jakarta.

Bab III berisi tentang pemaparan secara global mengenai gambaran umum reklamasi yang terdiri dari lima sub bahasan. *Pertama*, sejarah dan makna reklamasi. *Kedua*, dampak reklamasi. *Ketiga*, kebijakan reklamasi Basuki Tjahaja Purnama. *Keempat*, legalitas reklamasi dalam kebijakan Basuki Tjahaja Purnama. *Kelima*, kepentingan reklamasi bagi masyarakat Jakarta.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu berupa data-data yang diperoleh di lapangan, dalam hal ini berkaitan dengan fokus penelitian yang mengacu kepada dampak kebijakan Basuki Tjahaja Purnama terhadap reklamasi, kemudian di analisis berdasarkan teori kebijakan publik dan dibahas dalam bingkai perspektif siyasah secara aplikatif.

Bab V merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan Basuki Tjahaja Purnama tentang reklamasi teluk Jakarta memberikan dampak secara langsung yang meliputi dampak politik, ekonomi dan lingkungan yang dialami oleh masyarakat kampung Muara Angke terutama yang berprofesi sebagai nelayan. Kebijakan reklamasi tersebut tidak melalui proses musyawarah yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam menetapkan suatu kebijakan, sehingga ini merupakan faktor yang mempengaruhi secara langsung terhadap kondisi sosial masyarakat nelayan yang menyatakan menolak reklamasi dengan alasan penghasilan nelayan kampung Muara Angke menurun secara drastis yang disebabkan oleh besarnya biaya operasional yaitu meningkatnya kebutuhan BBM kapal nelayan dan proyek reklamasi menyebabkan terganggunya aktivitas melaut mereka. Selain itu, reklamasi berdampak langsung terhadap lingkungan mereka bahwa telah terjadinya luapan air laut yang melanda tempat tinggal masyarakat Muara Angke. Akan tetapi, ada sebagian responden yang menunjukkan adanya sikap optimisme jika proyek reklamasi tetap memperhatikan pemberdayaan masyarakat sekitar dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja baru

yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, sebagian masyarakat mengharapkan agar janji-janji dari pemerintah yang akan diberikan kepada masyarakat nelayan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Dalam tinjauan kebijakan politik Islam, Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta mengenai kebijakan reklamasi belum dapat sepenuhnya sesuai dengan konsep hak dan kewajiban seorang pemimpin yakni dari segi hak seorang pemimpin yang seharusnya ditaati dan dibantu oleh rakyatnya belum dapat terpenuhi, karena tugas dan kewajiban seorang pemimpin melalui kebijakan reklamasi belum sepenuhnya mencerminkan sikap adil dan pemerintah tidak melalui musyawarah secara mufakat yang dilakukan bersama masyarakat. Keadilan dapat diartikan sebagai bentuk perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Selain itu, seorang pemimpin dalam membuat kebijakan harus melalui musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum ditetapkannya suatu kebijakan supaya tidak menimbulkan konflik sosial yang menyebabkan rakyat semakin dibuat menderita.

Interpretasi data dari pembahasan sebelumnya ialah mengenai fakta yang belum menunjukkan bentuk keadilan dari kebijakan tersebut dan kebijakannya tanpa dilakukan musyawarah sehingga kebijakan ini terkesan bahwa pemimpin bertindak sewenang-wenang. Seharusnya kebijakan dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, bukan menciptakan permasalahan

baru yang terjadi di lingkungan masyarakat nelayan dan menyebabkan terganggunya aktivitas nelayan dalam bekerja. Kemudian masih terdapat pelanggaran secara hukum yaitu telah terjadi kasus penyuapan terhadap anggota DPRD oleh pihak pengembang untuk mengesahkan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda nomor 8 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta, bahwa pengembang merasa keberatan atas kontribusi sebanyak 15 persen.

Lain halnya jika kebijakan reklamasi dilakukan tanpa menimbulkan dampak sebagaimana yang telah terjadi, dapat dibayangkan bahwa reklamasi dapat bermanfaat bagi masyarakat Jakarta khususnya bagi masyarakat kampung Muara Angke yang secara langsung akan mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Selain itu masyarakat secara umum dapat menikmati keindahan wilayah pesisir daripada sebelumnya yang terlihat sangat kumuh. Jika kota Jakarta sebagai Ibukota negara dipandang bersih, rapi, modern, nyaman, aman dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka dapat dikatakan Jakarta dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin seharusnya mengedepankan kebutuhan masyarakat, mengingat negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk tetap dilestarikan secara baik. Persoalan pembangunan melalui reklamasi harus betul-betul sejalan

dengan ketentuan mengenai dampak lingkungan yang ada. Akan lebih baik jika sumber daya alam dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hanya kesejahteraan yang dibutuhkan rakyat. Oleh karena itu rakyat sangat mengharapkan kebijakan yang memihak kepentingan masyarakat, bukan kepentingan korporasi tertentu. Hal itu menjadikan kebijakan reklamasi sangat rentan untuk mendiskredit pemerintah maupun golongan tertentu. Apabila pada semua kebijakan banyak terjadi diskredit satu sama lain maka suatu kebijakan tidak akan mampu mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga yang terjadi negara tidak dapat dipastikan maju berkembang pesat. Apalagi untuk bersaing dengan negara lain.

## **B. Saran**

1. Penelitian skripsi ini belum sepenuhnya sempurna maka diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif agar lebih detail mengenai mega proyek reklamasi ini.
2. Bagi setiap pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan diskredit berdasarkan tujuan yang baik dan tidak melanggar hukum.
3. Bagi seluruh rakyat wajib membantu dan menaati perintah pemimpinnya sejauh itu mengandung perintah untuk kebaikan bersama.

4. Perlu adanya evaluasi mengenai kebijakan ini bagi pemerintah untuk menganalisis problem yang terjadi.
5. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) harus bersikap tegas sebagaimana tugas dan fungsi KPK untuk siap memberantas korupsi di negeri ini, sehingga tidak terjadi pelanggaran secara hukum dari proyek yang rentan akan tindak pidana korupsi.
6. Dibutuhkan pemerintahan yang transparan, melalui musyawarah yang dilakukan kepada masyarakat mengenai program pemerintah yang akan dilaksanakan.
7. Kepada masyarakat untuk perlu andil dalam mengawasi dan mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang seharusnya kebijakan tersebut dapat bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an :

Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an.

### B. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdul Khaliq, Farid, *Fiqh Politik Islam*, Jakarta : AMZAH, 2005.

Al-Mawardi, Imam, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam/Imam al-Mawardi*, Jakarta : Qisthi Press, 2014.

Dawam, Rahadrjo, M, *Ensiklopedi Al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. Ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Taimiyyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah ; Etika Politik Islam / oleh Ibnu Taimiyyah*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.

### C. Lain-lain

#### 1. Buku Umum

Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik/Said Zainal Abidin*, Jakarta : Salemba Humanika, 2012.

Ahmad, Mumtaz, *State, Politics and Islam*, Indianapolis: American Trust Publications, 1986.

Banowati, Eva, *Geografi Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Darmawan, Ikhsan, *Mengenal Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta : Rajawali Press, 2010.
- Hardjosoewirdjo, Soekardjo, *Menuju Jakarta 2020*, Jakarta : RMBOOKS, 2008.
- Inoguchi, Takashi, “*Cities Ana Environment: New Approaches for Eco-Societes*”, Tokyo, New York, Paris: The United Nations University Press, 1999.
- Kamil, Syukron, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mulyanto, H. R, *Reklamasi Lahan Rendah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010
- M.Thalhah, Ahmad Hakim, *Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Nawawi, Hadari, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Nugroho, Riant, *Public Policy*, Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Rellua, Olivianty, *Proses Perizinan dan Dampak Lingkungan Terhadap Reklamasi Pantai*, Surabaya: Mitra Press, 2013.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Satria, Arif, *Politik Kelautan dan Perikanan*, Jakarta: Yayasan Obor, 2015.
- Sjadzali, Munawir, *Islam: Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sofyan, Ayi, *Etika Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinai (Mixed Methods)*, Bandung: ALFABETA, 2014.

Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Taimiyyah, Ibnu, *Kebijaksanaan Politik Nabi SAW*, Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997.

Winaryo, Budi, *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.

## **2. Jurnal :**

Djakapermana, Deni Ruchyat, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang, *Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan*, Kementerian PU.

Gendewa, *Valuasi Ekonomi Reklamasi Pantai*, Teknik Manajemen Pantai, 2014.

Hadi S. Alikodra, *Dampak Reklamasi Teluk Jakarta Pada Ekosistem Mangrove*, Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, 1996.

Muhammad Mulyadi, *Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakarta*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2015.

Suntoyo, *Studi Laju Sedimentasi Akibat Dampak Reklamasi Di Teluk Lamong Gresik*, Jurusan Teknik Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), 2013.

## **3. Skripsi**

Muiz, Abdul, *Twitter Sebagai Media Propaganda (Analisis Wacana Pada Tweet Akun @ForBali13 Sebagai Media Propaganda Tolak Reklamasi Tanjung Benoa Periode 1 Desember 2014-31 Januari 2015)*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Rahmat, Audi, *Pengesahan Pelaksanaan Perizinan Reklamasi Pantai di Kota Makassar*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2014.

Tanlain, Eka, Christiningsih, *Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas Maritim Indonesia – Singapura*, Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2014.

Yudha, Hisdan, Satria, *Pemberitaan Penolakan FPI Terhadap Basuki Tjahaja Purnama Sebagai Gubernur DKI Jakarta Dalam SKH Republika*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

#### **4. Internet:**

<https://wikipedia.org>, diakses pada 30 April 2016.

<https://pengertianahli.com>, diakses pada 30 Maret 2016.

<https://hukumonline.com>, diakses pada 30 Maret 2016.

<https://hizbut-tahrir.com>, diakses pada 28 Juli 2016.

<https://pengkajian.dpr.go.id>, diakses pada 1 Agustus 2016.

<https://kompas.com>, diakses pada 20 Juni 2016.

<https://reklamasi-pantura.com>, diakses pada 22 Mei 2016.

<https://megapolitan.kompas.com>, diakses pada 4 September 2016.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Lampiran I

No	Hlm.	Fn.	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1.	7	8	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulilamri di antara kamu.
<b>BAB II</b>			
2.	33	28	Kaum Musa berkata: “Kami telah ditindas (oleh Fir’aun) sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab: “Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi (Nya), maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu.
3.	39	32	Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.
<b>BAB IV</b>			
4.	82	73	Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata)

			atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
5.	83	74	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
6.	86	77	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
7.	90	82	Terhadap Seorang Muslim hendaknya ia mau mendengarkan dan taat pada pimpinan, baik ia suka atau tidak suka. Kecuali jika pimpinan itu memerintahkan suatu maksiat, maka jika maksiat itu diperintahkan olehnya maka janganlah didengarkan dan tidak perlu ditaati (HR. Muslim).

Lampiran II

**PEDOMAN WAWANCARA**

**MASYARAKAT NELAYAN**

- 1) Bagaimanakah pendapat Bapak mengenai adanya proyek reklamasi di teluk Jakarta? Apakah setuju atau tidak? Alasannya?
- 2) Apa keuntungan dari adanya reklamasi?
- 3) Apa kerugian dari adanya reklamasi?
- 4) Apakah dampak reklamasi bagi masyarakat nelayan? (dampak politik dan dampak ekonomi)
- 5) Apa kepentingan reklamasi bagi masyarakat nelayan?
- 6) Jika ada penolakan, maka apa saja bentuk penolakan terhadap kebijakan Ahok tentang reklamasi?
- 7) Mengenai kebijakan reklamasi, apakah sebelumnya sudah ada musyawarah di antara pemerintah dengan masyarakat setempat?

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

- 1) Apa yang menjadi latar belakang munculnya gagasan reklamasi di Teluk Jakarta?
- 2) Tujuan reklamasi itu apa?
- 3) Mengapa melibatkan pihak pengembang?
- 4) Bagaimana solusi mengatasi dampak dari reklamasi?
- 5) Apa pentingnya reklamasi bagi masyarakat Jakarta?
- 6) Bagaimana landasan hukum/mengenai legalitas dari mega proyek reklamasi?
- 7) Apakah ada unsur-unsur yang bersifat politis terhadap kebijakan reklamasi?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **AKADEMISI**

- 1) Apa latar belakang dari kebijakan reklamasi?
- 2) Bagaimana Anda melihat fenomena proyek reklamasi di lihat dari perspektif keilmuan Anda?
- 3) Apa tujuan dari reklamasi?
- 4) Apa dampak dari reklamasi?
- 5) Bagaimana solusi menghadapi dampak dari reklamasi?
- 6) Apa pentingnya reklamasi bagi masyarakat Jakarta?
- 7) Mengapa reklamasi perlu melibatkan pihak swasta/pengembang?
- 8) Apa manfaat dari reklamasi?
- 9) Apakah ada unsur-unsur yang bersifat politis terhadap kebijakan reklamasi?

## BIOGRAFI IMAM AL-MAWARDI



Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali Ibn Muhammad yang di dalam sumber-sumber kajian sejarah dan fikih lebih dikenal dengan sebutan Al-Mawardi. Sebutan tersebut dinisbatkan pada pekerjaan keluarganya yang ahli membuat *māul waradi* (air mawar) dan menjualnya. Ia dilahirkan di Basrah pada tahun 364 H/972 M. Sejak kecil hingga menginjak remaja, ia tinggal di Basrah dan belajar fikih Syafi'i kepada seorang ahli fikih yang alim, yaitu Abu Qasim sah-Shaimari. Setelah itu, ia merantau ke Baghdad mendatangi para ulama di sana untuk menyempurnakan keilmuannya di bidang fikih kepada tokoh Syafi'iyah al-Isfiryani. Di samping itu, ia juga belajar ilmu bahasa Arab, hadis dan tafsir. Ia wafat pada tahun 450 H/1058 M dan dikuburkan di kota al-Manshur di daerah Babi Harb Baghdad (Lihat: Ibnu al-Jauzi, *Al-Muntazham*, Juz VIII tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 450 H).

Meskipun Imam al-Mawardi meraih popularitas yang gemilang selama hidup di Baghdad, sumber-sumber sejarah tidak menyuguhkan informasi yang lengkap mengenai kehidupan rumah tangganya, seperti kehidupan di Basrah dan Baghdad.

Pada masa Khalifah Abbasiyah al-Qadir Billah, para pemuka Syafi'iyah terbilang dominan, terutama setelah Imam al-Mawardi menghadiahkan *mukhtashar* fikih Syafi'i kepada sang khalifah yang diberi judul *al-Iqnā'* (Lihat: Yaqut, *Mu'jam al-Udaba'*, juz XV, hlm. 54-55).

Imam al-Mawardi di satu sisi dikenal sebagai duta diplomasi pemerintah Bani Buwaih dan di sisi lain sebagai duta diplomasi khalifah Abbasiyah, terutama Khalifah Qaim Biamrillah. Di samping itu, ia juga menjadi duta diplomasi di kalangan pemerintah Saljuk di awal pemerintahannya. Salah satu di antara misi yang diusungnya ketika menjadi duta diplomasi adalah untuk mendamaikan antara kubu-kubu politik yang berseberangan dan kubu-kubu lain yang sering berlindung di bawah kekuatan senjata dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi (Lihat: Ibnu al-Jauzi, *Al-Muntazham*, juz VII dan VIII).

Dari ranah pemikiran, Abu Hasan al-Mawardi telah banyak mewarnai pemikiran keislaman dengan berbagai karyanya, seperti kitab tafsir, fikih, *hisbah*, serta sosio-politik, dan karyanya yang paling monumental adalah kitab *Ahkam Shulthoniyyah*, (hukum-hukum ketatanegaraan) yang hingga kini menjadi kitab rujukan paling populer bagi setiap orang yang mengkaji ilmu perpolitikan di kalangan umat Islam.

Begitu juga di dalam fikih keislaman, Imam al-Mawardi banyak mewarnainya dengan berbagai ijtihad yang dihasilkan dari diskusinya dengan ulama-ulama Islam pada masanya (Lihat: Tajuddin as-Subki, *Thabaqat saf-Syafi'iyah al-Kubra*, juz V, hlm. 267 dan sesudahnya).

## Akses Masuk Menuju Pulau G



## Perahu Nelayan Kampung Muara Angke



## Pemukiman Warga Muara Angke RW 01



## **Pintu Masuk Pemukiman Nelayan Muara Angke**



## **Tempat Pelelangan Perikanan Muara Angke**



**Wawancara dengan Perangkat Desa Muara Angke di Kantor RW 01**



**Wawancara dengan dosen UNJ di Fakultas Ilmu Sosial UNJ**



**Wawancara dengan Bapak Rizka Okie Selaku Kasubid Peraturan  
Pelaksanaan Setda Prov DKI Jakarta di Balaikota**



**Wawancara dengan Bapak Feirully Irzal Selaku Kasubid Tata Ruang  
Bappeda DKI Jakarta di Balaikota**



## CURRICULUM VITAE

### A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Muh Rifqi Iqsobayadinur
2. Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 9 Oktober 1994
3. Alamat Asal : Dk. Karang Sawah Utara RT. 006 RW.  
005 Desa Kutamendala, Kec. Tonjong,  
Kab. Brebes
4. Alamat Yogyakarta : Asrama Takmir Masjid UIN Sunan  
Kalijaga
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Hoby : Membaca dan bermain musik
8. Handphone : 085786242725
9. E-mail : [m.rifqiiqso@yahoo.com](mailto:m.rifqiiqso@yahoo.com)
10. Pin BBM : 56575C5A
11. Nama Orang Tua :  
Ayah : Moh. Sobir  
Ibu : Roziqoh

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK RA Masyithoh Kutamendala
2. SD Negeri Kutamendala 01
3. SMP Muhammadiyah Tonjong
4. SMK Negeri 1 Tonjong
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### C. Riwayat Organisasi

1. Muadzin Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Sekretaris Pengurus Harian Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga.